

**PERAN LEMBAGA *SANIRI NEGERI* DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK PADA *NEGERI* DI KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

Skripsi

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan oleh :

FELIX ABRAHAM SOEDIONO

NIM : 21.C1.0091

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Saniri Negeri adalah sebuah Lembaga Adat yang terdapat pada *Negeri* (Desa Adat) di Provinsi Maluku. Pada masa orde baru, dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggeneralisasi Lembaga Adat menjadi bagian dari Pemerintahan Desa yang melemahkan wewenang dari Lembaga Adat termasuk *Saniri Negeri*. *Saniri Negeri* sebagai Lembaga Adat berwenang dalam menangani permasalahan dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat (*Negeri*), namun akibat adanya generalisasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa melemahkan wewenang *Saniri Negeri*. Lembaga Adat kembali diakui melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *Saniri Negeri* turut kembali diakui sebagai Lembaga Adat. Pengakuan kembali *Saniri Negeri* sebagai lembaga adat berarti bahwa *Saniri Negeri* berwenang untuk menjalankan tugas Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan peraturannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Saniri Negeri* dalam *Negeri* di Kabupaten Maluku Tengah serta Peran *Saniri Negeri* dalam Penyelesaian Konflik di Maluku Tengah.

Kata Kunci : Lembaga Adat Desa, Penyelesaian Konflik, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Masyarakat Hukum Adat, *Saniri Negeri*, *Negeri*.